



Nepotisme dan Korupsi di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika

Tingka Febry Tory^{1*}, Rizkia Amelia Hanum²

¹⁻²Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia

Alamat: Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15413 Banten Indonesia

Abstract. *This paper discusses the phenomenon of nepotism and corruption in government from an ethical perspective. Through literature analysis and case studies, this paper examines how nepotism and corruption violate ethical principles, undermine the integrity of government, and harm society. This paper identifies the various forms of nepotism and corruption that occur in government, and analyzes their negative impact on governance, efficiency, and justice. It also discusses the factors that drive nepotism and corruption, such as patronage culture, weak law enforcement, and lack of transparency. As a solution, this paper recommends several strategic steps to prevent and eradicate nepotism and corruption in government, such as strengthening the meritocracy system, increasing transparency and accountability, and ethics education for public officials. This paper is expected to contribute to raising awareness about the importance of ethics in government, as well as encouraging efforts to create a clean, fair and integrity government.*

Keywords: *Nepotism, Corruption, Ethical Perspective, Government.*

Abstrak. Paper ini membahas fenomena nepotisme dan korupsi di pemerintahan dalam perspektif etika. Melalui analisis literatur dan studi kasus, paper ini mengkaji bagaimana praktik nepotisme dan korupsi melanggar prinsip-prinsip etika, merusak integritas pemerintahan, dan merugikan masyarakat. Paper ini mengidentifikasi berbagai bentuk nepotisme dan korupsi yang terjadi di pemerintahan, serta menganalisis dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, efisiensi, dan keadilan. Selain itu, paper ini juga membahas berbagai faktor yang mendorong terjadinya nepotisme dan korupsi, seperti budaya patronase, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Sebagai solusi, paper ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mencegah dan memberantas nepotisme dan korupsi di pemerintahan, seperti penguatan sistem meritokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta edukasi etika bagi para pejabat publik. Paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika di pemerintahan, serta mendorong upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

Kata kunci: Nepotisme, Korupsi, Perspektif Etika, Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan merupakan pilar penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Namun, roda pemerintahan tidak berjalan sendiri, melainkan dijalankan oleh aparatur pemerintahan, yang merupakan sumber daya manusia yang memegang peran krusial. Aparatur pemerintahan memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mengatur urusan negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka harus dijalankan dengan integritas tinggi. Perilaku menyimpang dari aparatur pemerintahan, seperti melanggar ketentuan tugas dan kewenangan, akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintahan tidak boleh hanya mengejar hak dan kenyamanan, tetapi juga harus menjalankan kewajiban dan kinerja dengan baik. Profesionalisme dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi menjadi kunci utama.

Aparatur pemerintahan berperan sebagai pelayan masyarakat. Harapan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik terletak pada kinerja mereka. Negara-negara yang pilar demokrasi tidak berfungsi optimal, akan sulit mencapai kualitas pelayanan publik yang baik. Sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis justru berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pada akhirnya akan menjadi penyakit baru dalam pemerintahan.

Korupsi dan nepotisme merupakan dua fenomena yang seringkali terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kedua praktik ini tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari perspektif etika, korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas. Korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, dengan mengabaikan kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena korupsi merugikan masyarakat dan menguntungkan segelintir orang. Korupsi juga melanggar prinsip integritas, karena tindakan koruptif menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakpercayaan terhadap sistem.

Nepotisme, di sisi lain, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip meritokrasi, keadilan, dan imparcialitas. Nepotisme terjadi ketika seseorang memberikan keistimewaan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat dalam hal pekerjaan, jabatan, atau akses terhadap sumber daya, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi. Praktik ini melanggar prinsip meritokrasi, karena seseorang mendapatkan keuntungan bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena hubungan kekeluargaan. Nepotisme juga melanggar prinsip keadilan, karena orang yang lebih kompeten mungkin terpinggirkan dan tidak mendapat kesempatan yang sama.

Korupsi dapat menjadi alat untuk melakukan nepotisme, dan nepotisme dapat membuka jalan bagi korupsi. Misalnya, seorang pejabat yang korup mungkin menggunakan jabatannya untuk memberikan pekerjaan kepada kerabatnya, meskipun kerabat tersebut tidak memiliki kualifikasi. Hal ini dapat merugikan negara dan masyarakat karena pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan profesional dan kompeten. Kedua praktik ini dapat merusak tata kelola pemerintahan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan sosial. Korupsi dan nepotisme juga dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami korupsi dan nepotisme dalam perspektif etika. Dengan memahami nilai-nilai etika yang dilanggar oleh kedua praktik ini, penulis berharap para pembaca dapat lebih memahami dampak negatifnya dan mendorong upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Nepotisme

Nepotisme, yaitu praktik memberikan keistimewaan kepada keluarga atau kerabat dalam hal pekerjaan, merupakan masalah serius yang merugikan masyarakat dan negara. Praktik ini, yang seringkali melibatkan penempatan kerabat dalam posisi pekerjaan tanpa mempertimbangkan kualifikasi mereka, bertentangan dengan prinsip meritokrasi, di mana seseorang mendapatkan pekerjaan berdasarkan kemampuan dan prestasi (Fisman dan Golden 2017).

Di sektor publik, nepotisme dianggap beracun karena mengabaikan kepentingan publik. Warga negara berharap pegawai negeri dipekerjakan berdasarkan kriteria yang adil dan transparan, bukan berdasarkan hubungan keluarga. Nepotisme merusak hubungan antara pekerjaan dan meritokrasi, membuka peluang untuk eksploitasi negara dan merugikan masyarakat. Dampak negatif nepotisme meliputi persaingan yang tidak sehat untuk mendapatkan pekerjaan (Geys 2017; Szakonyi 2019), penggelapan dana publik (Lehne, Shapiro, dan Vanden Eynde 2018), dan penurunan kualitas layanan publik. Meskipun nepotisme merupakan masalah yang signifikan di sektor publik, penelitian akademis tentang fenomena ini masih terbatas, terutama karena kesulitan dalam mengukur nepotisme secara sistematis di suatu negara.

Korupsi

Korupsi merupakan tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan negara. Ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari penyalahgunaan dana pemerintah hingga penyalahgunaan jabatan publik, korupsi merongrong integritas dan transparansi dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Korupsi berarti perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Penyebab korupsi bisa beragam, termasuk ketidakmampuan menahan godaan materi dan cara pandang yang salah terhadap kekayaan. Korupsi memiliki dampak negatif yang luas, merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain.

Berbagai organisasi internasional dan hukum nasional mendefinisikan korupsi dalam pandangan mereka. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan. Bank Dunia mendefinisikannya sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk

keuntungan pribadi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 di Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Korupsi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan dalam berbagai proses, seperti pengadaan, pungutan, dan perizinan, yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat (Juniadi Suwartojo, 1997).

Etika

Etika merupakan kajian tentang prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks bisnis, etika bisnis merujuk pada norma-norma dan standar yang mengatur tindakan perusahaan dan individu dalam lingkungan ekonomi. Etika bisnis tidak hanya mencakup kewajiban hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap etika bisnis dapat berdampak negatif tidak hanya pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi komprehensif yang menggabungkan tinjauan literatur dan analisis kritis untuk menyelidiki fenomena nepotisme dan korupsi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami nepotisme dan korupsi pada pemerintah dalam perspektif etika. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai strategi pencegahan nepotisme dan korupsi yang telah diterapkan atau diusulkan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena nepotisme dan korupsi aparatur pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam gejala dan peristiwa pemerintahan dalam hal-hal yang dibutuhkan saat ini, dan mengungkap fenomena nepotisme dan korupsi yang terjadi.

Data dikumpulkan dari tiga sumber: dokumen, orang, dan tempat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan studi dokumen. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan bacaan yang relevan dengan perilaku nepotisme dan korupsi. Melalui analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku nepotisme dan korupsi dalam pemerintahan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nepotisme dan korupsi melanggar prinsip-prinsip etika, merusak integritas pemerintahan, dan merugikan masyarakat.

Di sektor pemerintahan, pelanggaran etika bisnis seringkali muncul dalam bentuk nepotisme dan korupsi. Nepotisme, yang mengacu pada praktik memberikan keuntungan kepada kerabat atau orang-orang terdekat dalam pengambilan keputusan, dapat mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Sementara itu, korupsi, yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merusak integritas institusi pemerintah dan mengikis kepercayaan publik.

Fenomena nepotisme dan korupsi di pemerintahan tidak hanya mencerminkan pelanggaran etika, tetapi juga berdampak luas terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kedua praktik ini dari perspektif etika, guna memahami implikasi dan mencari solusi yang lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam *paper* ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai hubungan antara etika bisnis dan praktik nepotisme serta korupsi di pemerintahan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini.

Bentuk nepotisme dan korupsi yang terjadi di pemerintahan, serta analisis dampak negatifnya terhadap tata kelola pemerintahan, efisiensi, dan keadilan.

Dalam etika bisnis, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, seperti prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjaga integritas operasional bisnis dan mencegah pelanggaran etika bisnis. Namun, dalam realita pemerintahan, praktik nepotisme yang merujuk pada pengutamaan anggota keluarga atau kerabat dalam pengambilan keputusan dan penempatan jabatan-sering kali mengabaikan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Sementara itu, korupsi, yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam perspektif etika, tindakan nepotisme dan korupsi mencerminkan kegagalan moral para pemimpin dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Oleh karena itu, *paper* ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara nepotisme dan korupsi dalam pemerintahan melalui lensa etika, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan saat ini dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Nepotisme di pemerintahan sering kali terjadi ketika pejabat publik memberikan posisi atau kontrak kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan tetapi juga menutup peluang bagi individu lain yang lebih layak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, nepotisme didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroni di atas kepentingan masyarakat dan negara¹. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme bukan hanya masalah etika tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Contoh nyata dari nepotisme dapat dilihat dalam pengisian jabatan publik, di mana pejabat lebih memilih untuk mengangkat kerabatnya daripada individu yang memiliki kualifikasi lebih baik. Praktik ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan merusak moral pegawai lainnya. Selain itu, nepotisme juga dapat mempengaruhi pengadaan barang dan jasa, di mana kontrak diberikan kepada perusahaan milik kerabat tanpa melalui proses tender yang transparan².

Korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, maka legitimasi pemerintah akan terguncang. Dampak negatif dari korupsi sangat luas; mulai dari penghambatan pembangunan ekonomi hingga meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Korupsi juga berkontribusi pada kemiskinan dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik ke kantong individu-individu tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi setiap pemerintah.

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya nepotisme dan korupsi, seperti budaya patronase, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya transparansi.

Nepotisme dan korupsi merupakan dua fenomena yang telah lama menghantui pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dan rakyat, tetapi juga merusak tatanan moral dan etika pemerintahan. Paper ini akan menganalisis nepotisme dan korupsi dalam pemerintahan dari perspektif etika, dengan fokus pada dampaknya terhadap integritas, akuntabilitas, dan keadilan.

Etika Nepotisme dan Korupsi memberikan begitu banyak dampak yang berkonotasi buruk, yaitu merusak integritas pemerintahan, ketika pejabat publik memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga di atas kepentingan negara, kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan terkikis. Selanjutnya yaitu, penurunan akuntabilitas, nepotisme dan korupsi

membuat pemerintahan tidak akuntabel. Pejabat yang terlibat dalam praktik ini cenderung tidak transparan dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Nepotisme dan korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Orang-orang yang tidak memiliki koneksi atau kekuasaan akan sulit mendapatkan akses terhadap layanan publik dan kesempatan yang sama. Nepotisme dan korupsi merusak moral masyarakat. Ketika praktik ini dianggap wajar dan dibiarkan, nilai-nilai etika dan moral akan terdegradasi. Etika dan moralitas merupakan fondasi penting dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan integritas harus menjadi pedoman bagi setiap pejabat publik.

Dari perspektif etika, baik nepotisme maupun korupsi melanggar prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Etika berfungsi sebagai landasan untuk menilai tindakan individu dalam konteks moralitas. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk membangun budaya etika di dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan etika bagi pejabat publik serta penerapan kebijakan anti-nepotisme dan anti-korupsi yang ketat. Pendidikan etika dapat membantu meningkatkan kesadaran para pejabat tentang konsekuensi negatif dari praktik nepotisme dan korupsi. Selain itu, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar juga diperlukan untuk memberikan efek jera. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat melihat bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik-praktik tidak etis tersebut.

Langkah strategis untuk mencegah dan memberantas nepotisme dan korupsi di pemerintahan

Nepotisme dan Korupsi merupakan dua hal yang harus segera diatasi untuk mencegah hal-hal yang tidak baik kedepannya. Dalam hal ini bisa dicegah dalam beberapa cara, yaitu:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara 5. Dalam hal ini, Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran.

Transparansi dilakukan dengan membuka akses publik terhadap informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses mengenai berbagai proses, kebijakan, dan keputusan yang diambil pemerintah. Dengan transparansi yang tinggi, setiap aktivitas pemerintahan, terutama yang

berkaitan dengan penggunaan anggaran, penunjukan jabatan, atau pengadaan barang dan jasa, dapat diawasi oleh masyarakat dan pihak terkait. Ini menciptakan sistem yang lebih terbuka, sehingga pejabat publik lebih sulit untuk menyembunyikan tindakan yang tidak etis, seperti penyalahgunaan wewenang atau pengangkatan kerabat tanpa kualifikasi.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Akuntabilitas menuntut pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, baik secara administratif maupun hukum. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, seperti audit berkala, laporan publik, dan pengawasan eksternal, pejabat yang terlibat dalam pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban pejabat untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat, sehingga mengurangi potensi terjadinya praktik nepotisme, di mana keputusan diambil berdasarkan hubungan pribadi daripada meritokrasi.

2. Penguatan Lembaga Pengawas

Lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberikan kewenangan dan dukungan yang kuat untuk menjalankan tugasnya.

Penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas nepotisme dan korupsi di pemerintahan. KPK dan BPK memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan integritas dan akuntabilitas di dalam pemerintahan melalui pengawasan, investigasi, dan audit terhadap kebijakan serta penggunaan anggaran negara.

Memperkuat kewenangan KPK dalam investigasi dan penuntutan tindak pidana korupsi diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi politik atau tekanan yang menghambat penyelidikan kasus-kasus besar. Independensi KPK harus dijaga agar lembaga ini dapat menyelidiki dan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, termasuk pejabat tinggi yang mungkin terlibat dalam praktik nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan.

BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas audit keuangan negara perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui penggunaan teknologi audit modern dan peningkatan transparansi hasil audit. Dengan kapasitas yang lebih kuat, BPK dapat lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi penyimpangan keuangan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Transparansi dalam laporan audit juga akan membuka peluang bagi masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pejabat publik.

3. Pendidikan Etika dan Moral

Pendidikan etika dan moral harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi calon pemimpin dan pejabat publik. Dengan pendidikan etika dan moral yang kuat, individu akan dibekali dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan, yang menjadi dasar perilaku yang bersih dan profesional dalam menjalankan tugas publik. Pendidikan ini akan membentuk karakter pemimpin yang tidak hanya kompeten dalam bidang teknis, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani masyarakat tanpa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Calon pemimpin akan lebih sadar terhadap konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga mencegah praktik nepotisme dan korupsi yang sering muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan etika dan moral tidak hanya ditujukan kepada calon pemimpin, tetapi juga harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik nepotisme dan korupsi. Nepotisme dan korupsi merupakan ancaman serius bagi pemerintahan dan negara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dan rakyat, tetapi juga merusak tatanan moral dan etika. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nepotisme dan korupsi adalah dua fenomena yang saling terkait dan memiliki dampak serius terhadap pemerintahan

serta masyarakat. Melalui pendekatan etika yang kuat, pemerintah dapat membangun integritas birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan serta penegakan hukum yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik tidak etis. Dengan demikian, upaya pemberantasan nepotisme dan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Nepotisme dan korupsi merupakan ancaman serius bagi pemerintahan dan negara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dan rakyat, tetapi juga merusak tatanan moral dan etika. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Shawawreh, T. B. (2016). Economic effects of using nepotism and cronyism in the employment process in the public sector institutions. *Macrothink Institute*.
<https://www.macrothink.org/journal/index.php/rae/article/view/9227>
- Oktariyanda, T. A., Wawointana, T., & Fakhri, K. (2018). Review acts of corruption through the perspectives of the ethics of public administration theory. *Atlantis Press*.
<https://typeset.io/pdf/review-acts-of-corruption-through-the-perspectives-of-the-1so6ylzvk8.pdf>
- Ragauskas, R., & Valeškaitė, I. (2020). Nepotism, political competition, and overemployment. *Political Research Exchange*. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781542>
- Setyaningsih, S. (2021). Analisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. BPR BKK Pracimantoro. *Jurnal Mahasiswa STIESIA*.
<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>